

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PADANG KETIKA TERJADI
GEMPA BUMI**



Oleh

HARIS SYAPUTRA

BP:1710112078

Pembimbing I

Nelwitis S.H.,M.H.

Pembimbing II

Dr. Nilma Suryani S.H.,M.H.

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Fakultas Hukum

Universitas Andalas

Padang

2021

No. Reg. 08/PK-IV/II/2021



a) Tempat/ Tanggal Lahir	: Bukittinggi, 10 Juni 1999	f) Tanggal Kelulusan	: 5 April 2021
b) Nama Orang Tua	: Suharmen Bahry	g) Predikat	: Cumlaude
c) Fakultas	: Hukum	h) Lama Studi	: 3 thn 10 bln
d) PK	: Hukum Pidana	I) IPK	: 3, 64
e) No BP	: 1710112078	j) Alamat	: Bukittinggi

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PADANG KETIKA TERJADI GEMPA BUMI**

(HARIS SYAPUTRA, 1710112078, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 halaman, tahun 2021)

ABSTRAK

Narapidana hanya kehilangan hak atas kebebasannya, salah satu hal yang dapat membahayakan hak Narapidana adalah ketika terjadi Gempa bumi, karena Gempa Bumi tidak dapat diprediksi dan bisa datang kapan saja. Berdasarkan hal itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang harus memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman gempa bumi, karena lokasi lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang sangat berdekatan dengan lautan dan rentan dengan resiko tsunami. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN TERHADAP HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KETIKA TERJADI GEMPA BUMI”. Daftar rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana upaya terhadap perlindungan hak Narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang ketika terjadi gempa bumi?. 2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak Narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang ketika terjadi gempa bumi dan cara mengatasinya? Berdasarkan penelitian diketahui bahwa belum ada pengaturan yang mengatur secara rinci mengenai tata cara penyelamatan Narapidana ketika terjadi gempa bumi, jika terjadi gempa bumi maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang berhak melakukan diskresi sesuai dengan jabatan dan kewenangannya untuk menyelamatkan Narapidana. Selama berada di tempat evakuasi, hak Narapidana tetap dipenuhi, terutama Narapidana lansia yang memerlukan perawatan kesehatan khusus. Kendala yang dihadapi antara lain: 1. Informasi bencana yang bersifat prediksi. 2. Kesulitan komunikasi saat terjadinya bencana. 3. Minimnya petugas lapas. 4. *Overcrowded* warga binaan. 5. Stigma buruk masyarakat terhadap warga binaan pemasyarakatan 6. Kerawanan warga binaan melarikan diri saat proses evakuasi. Mengatasi kendala tersebut dilakukan dengan cara: 1. Instruksi kepada petugas lapas untuk mencari validasi informasi. 2. Komunikasi digunakan dengan radio. 3. Bekerja sama dengan instansi terkait ketika penanganan bencana. 4. Melakukan tindakan *preventif* agar tidak terjadi tindak pidana. 5. Memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa warga binaan merupakan manusia yang tetap memiliki hak yang sama dengan masyarakat. 6. Melakukan pengamanan yang lebih ketat ketika terjadi bencana.

Kata Kunci: Narapidana, Gempa Bumi, Penyelamatan, Hak Narapidana

Penguji,

Tanda Tangan		
Nama	Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.	Efren Nova, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Pidana: **Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H**

Tanda Tangan

Alumnus sudah diregistrasi di Fakultas/Universitas dan sudah mendapatkan nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: